

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena Renja Perubahan BPLH Kabupaten Bandung tahun 2015 ini telah disusun berdasarkan Renja Tahun 2015 dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung 2010-2015 dan RKPD Kabupaten Bandung 2011.

Sejalan dengan kebijakan RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tersebut maka diharapkan rincian program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan BPLH tahun 2015 ini dapat menjadi bahan penyusunan Renja kami selanjutnya dan evaluasi Rencana Strategis BPLH 2010 – 2015. Juga dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Adapun Renja Perubahan BPLH yang telah kami susun ini sesungguhnya masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami berharap masukan dan petunjuk untuk penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini.

Semoga segala upaya yang kami laksanakan mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah SWT.

Bandung, Juni 2015

KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

Ir .Hj. ATIH WITARTIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19601225 198603 2 007

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Dan Capaian Renstra SKPD RENJA BPLH Tahun 2015	II-1
2.2. Analisa Pencapaian Kinerja Sasaran	II-6
2.3. Akuntabilitas keuangan	II-20
2.4. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan bulan Mei 2015	II-26
2.5. Permasalahan Dan Pemecahan masalah Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi SKPD	II-36
2.6. Upaya mengatasi permasalahan untuk program dan Kegiatan tahun 2015	II-39
2.7. Penjelasan Tentang Usulan Program/Kegiatan SKPD	II-40
BAB III VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS,PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015	
3.1. Visi dan Misi	III-1
3.2. Tujuan Strategis	III-2
3.3. Indikator kinerja Utama dan target jangka Menengah	III-3
3.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran	III-4
3.5. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-7
3.6. Pembiayaan	III-8
3.7. Program dan Kegiatan	III-9
3.8. Penetapan Kinerja Tahun 2015	III-9

3.9. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan BPLH Tahun 2015	III-15
---	--------

BAB IV PENUTUP	IV-1
-----------------------	------

Lampiran :

1. Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bandung Perubahan Tahun 2015
2. Format I.G. Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2015 sampai dengan Bulan Mei 2015 Kabupaten Bandung.
3. Format I.H. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Kabupaten Bandung.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta iindikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2013 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan RKUA Tahun 2015.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat di dalam dokumen Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD berisi arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diperoleh dari Renja SKPD. Sehubungan hal tersebut Renja SKPD menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Renja SKPD disusun berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD yang disesuaikan dengan kondisi, potensi daerah serta kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan nasional yang ditetapkan yang akan dilaksanakan pada satu tahun.

Renja BPLH tahun 2015 yang secara mekanisme mengacu kepada nomen klatur Permendagri nomor 13 tahun 2006 juncto Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah disusun dengan perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan BPLH dan disinergikan dengan pembangunan daerah (diantaranya rehabilitasi kerusakan lingkungan dan penanganan bencana) yang berdasarkan kepada :

- Capaian hasil program dan kegiatan tahun 2014 yang perlu ditindaklanjuti
- Kondisi lingkungan saat ini yang menunjukkan penurunan kualitas lingkungan akibat terjadinya pencemaran, terbentuknya lahan kritis, menurunnya daya tampung dan daya dukung
- Potensi daerah meliputi kekayaan SDA, keanekaragaman hayati, pertumbuhan ekonomi, kegiatan usaha, dan peningkatan kemampuan SDM.
- Peraturan dan kebijakan nasional yang diantaranya pelaksanaan kewajiban sesuai dengan yang tertera dalam UULH Nomor 23 tahun 2009 tentang kajian lingkungan hidup strategis serta pelaksanaan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat meningkatkan upaya pemerintah kabupaten dalam pemulihan kualitas lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan yaitu dengan pelaksanaan program

Menuju Indonesia Hijau (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006).

- Adanya tanggung jawab SKPD dalam merealisasikan kegiatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kemen LH RI No.20 tahun 2008 tanggal 28 November 2008 yakni BPLH harus dapat mencapai target SPMnya 100 % tahun 2013 serta didukung oleh adanya upaya dalam pencapaian target sebagaimana tertuang dalam MGD's target

Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan anggaran tahun 2015 mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan ekonomi, sosial budaya dan kebutuhan yang sipatnya mendesak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran. Program dan kegiatan yang perlu dilakukan perubahan dilakukan analisis dan ditempuh melalui mekanisme perubahan anggaran yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal tersebut agar program dan kegiatan dalam pelayanan kepada publik dapat dilakukakan secara efektif dan efeasien maka Badan Pengendalian Lingkungan Hidup membuat Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- a. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- b. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
- c. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

- d. **UULH Nomor 23 tahun 2009** tentang kajian lingkungan hidup strategis serta pelaksanaan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup
- e. **Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. **Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah.
- g. **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006** tentang Program Menuju Indonesia Hijau.
- h. **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008** tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota,
- i. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004** tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D)
- j. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 Tahun 2005** tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D)
- k. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007** tentang urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten bandung tahun 2007 Nomor 17)
- l. **Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2011** tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2013
- m. **Perturan Bupati Bandung Nomor 23 tahun 2015** tentang *Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung.*

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perubahan BPLH tahun 2015 adalah sebagai acuan agar program dan kegiatan yang perlu dilakukan perubagan dapat dilaksanakan sehingga efektif dan efisien disamping itu rencana kerja perububahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah

kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai BPLH Kabupaten Bandung.

TUJUAN UMUM :

Tujuan penyusunan Renja Perubahan BPLH adalah untuk optimalisasi perencanaan program dan kegiatan tahun 2015 yang diakibatkan situasi dan kondisi saat ini sehingga mendorong program dan kegiatan dilakukan pergeseran, penambahan, atau efisiensi anggaran, disamping itu renja perubahan ini dilakukan untuk menjabarkan visi, misi dan program yang telah disusun, agar dapat dilaksanakan, dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu pedoman ini memudahkan dalam penentuan target indikator sasaran serta realisasi pemenuhan kebutuhan pencapaian kinerja seluruh unit kerja pada BPLH Kabupaten Bandung

TUJUAN KHUSUS :

- Diketahuinya variabel eksternal (ekonomi, demografi, epidemiologi, pendidikan, kebijakan, teknologi, supply SDM) yang menjadi peluang dan ancaman bagi BPLH Kabupaten Bandung
- Diketahuinya variabel internal (prestasi kerja, diklat, situasi ketenagakerjaan, dana/anggaran) yang menjadi kekuatan dan kelemahan bagi BPLH Kabupaten Bandung
- Diketahuinya strategi untuk pencapaian visi BPLH Kabupaten Bandung
- Ditetapkannya tujuan, sasaran dan program kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPLH Kabupaten Bandung
- Mempertimbangkan anggaran program dan kegiatan yang perlu dilakukan perubahan baik pergeseran, penambahan dan efisiensi anggaran berdasarkan prioritas, sasaran sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun langkah-langkah Sistematis Penyusunan Renja BPLH Kabupaten Bandung tahun 2015 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2015 berdasarkan pada dokum RPJMD, Renstra BPLH Lima Tahun Kedepan dan Rencana Kerja Tahun 2015
2. Melakukan Review Rancangan Awal Renja BPLH Kabupaten Bandung tahun 2015
3. Melakukan Review dan Evaluasi Pelaksanaan RKA BPLH Kabupaten Bandung tahun 2015.
4. Merumuskan Tujuan, Kebijakan, Sasaran Merumuskan Prioritas Program dan Kegiatan sesuai arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2015 di

bidang Lingkungan Hidup, yang meliputi upaya Peningkatan cakupan target dan kualitas Lingkungan sebagai Urusan Wajib kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung dalam pembangunan di bidang Lingkungan Hidup

5. Merumuskan Usulan Pagu Indikatif Perubahan tahun 2015 dengan mempertimbangkan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juli 2015 dan program prioritas yang perlu dilakukan perubahan.
6. Menyusun Dokumen Rancangan Renja Perubahan BPLH Kabupaten Bandung tahun 2015 dengan Sistematika:

Penyusunan Dokumen Rancangan Renja BPLH Kabupaten Bandung tahun 2015 dengan Sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 Dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
 - 2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
 - 2.3.2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
 - 2.5.1. Penjelasan Tentang Usulan Program/Kegiatan SKPD

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 sampai dengan Bulan Juli 2015

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2015 Sampai dengan Bulan Juni 2014
- 2.2. Penjelasan Tentang Usulan Program/Kegiatan Perubahan Tahun 2015

BAB III VISI, MISI DAN RENCANA, TUJUAN, dan SASARAN STRATEGIS , PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis
- 3.3 Visi dan Misi
- 3.4 Pembiayaan
- 3.5 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD RENJA BPLH TAHUN 2015

Urusan Bidang Lingkungan Hidup ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.11,338,467,500 (setelah perubahan anggaran) dapat direalisasikan sebesar Rp.10,189,802,206 (89,87%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program yang terdiri dari 12 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Dalam tahun anggaran 2014 BPLH Kabupaten Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja kesembilan sasaran tersebut dilakukan dengan mengaplikasikan 38(tiga puluh delapan) dari 45 (empat puluh lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

Hasil pengukuran kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel 3-1 berikut.

Tabel 2-1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup	Jumlah produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 paket DED IPAL Komunal, 1 paket Inventarisasi LH.	-	-
		Jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 kajian,yaitu : 1 Perbup Izin Lingkungan, dan sosialisasi Perbup Izin Lingkungan terhadap 100 stakeholder.	1 kajian yaitu : 1 Perda (Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan)	100
2.	- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi	390 usaha/kegiatan meliputi : 200 industri, 2 TPA,	424 usaha/kegiatan meliputi :	108

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
	terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan - Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan		14 RS/puskesmas, 10 RPH/peternakan, 12 agroindustri, 7 RM/hotel, 2 lapangan golf, 4 IPAL/IPLT, 3 laboratorium, 3 SPBE, 3 pengelola limbah B3, 30 usaha/kegiatan yang berpotensi menggunakan BPO, 60 usaha/kegiatan terkait SPM PPA dan 40 industri dalam rangka penentuan PPU .	200 industri, 2 TPA, 15 RS/puskesmas, 10 RPH/peternakan, 14 agroindustri, 8 RM/hotel, 2 lapangan golf, 4 IPAL/IPLT, 3 laboratorium, 3 SPBE, 3 pengelola limbah B3, 60 usaha/kegiatan yang berpotensi menggunakan BPO, 60 usaha/kegiatan terkait SPM PPA dan 40 industri dalam rangka penentuan PPU .	
		Jumlah lokasi pengujian kualitas air sungai	75 lokasi	75 lokasi	100
		Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	10 lokasi	10 lokasi	100
		Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas	3	3	100
		Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki IPAL	95%	95%	100
		Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara sumber tidak bergerak	90%	100%	100
		Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	95%	96%	100
		Persentase pnaatan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran air industri	55%	54%	100
		Persentase pnaatan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak industri	55%	86%	150

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
		Persentase penerapan teknis dan administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri	55%	45%	80
		Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (SPM)	100%	100%	100
		Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak (SPM)	100%	100%	100
		Persentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus selain "cemar berat"	5%	0%	0
		Persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90%	97,5%	108
		Jumlah sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan mengenai peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup	5	5	100
		Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan	350	350	100
		Luas tanah yang dipetakan untuk Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	1200 Ha	1200 Ha	100
3.	- Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah koordinasi dan sosialisasi dalam rangka program Adipura Kota Soreang	31 Koordinasi,yaitu : 5 kali rapat, 20 kali koordinasi, 6 kali pelatihan	44 koordinasi,yaitu: 6 kali rapat, 31 kali koordinasi, 7 kali pelatihan	141

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
	serta terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan para pemangku kepentingan - Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kebersihan di Kota Soreang (OPSIH /Operasi Bersih, Lomba Bersih-Hijau-Teduh, dan monitoring/ pembinaan titik pantau)	6 kali pelaksanaan yaitu : pengadaan sarana pengelolaan sampah (40 buah tong sampah, 25 buah komposter, 50 buah pot bunga, sosialisasi dan pelatihan 150 orang, Lomba kebersihan RW dan sekolah, OPSIH 3 kali	25 kali pelaksanaan yaitu : 1 kali lomba RW-ku Bersih; 1 kali lomba Sekolah-ku Bersih; 2 kali OPSIH; 18 kali monitoring dan pembinaan titik pantau; 2 kali pembinaan Kader Lingkungan, 1 kali penanaman dan peletakan pot bunga	416
		Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan	20 rapat koordinasi	20 rapat koordinasi	100
		Jumlah sosialisasi konservasi air (teknologi biopori)	7	7	100
		Jumlah bor biopori yang didistribusikan kepada masyarakat	100	100	100
		Jumlah Kegiatan Pembersihan Sungai/lingkungan	2	2	100
		Jumlah sosialisasi/penyuluhan penunjang program terpadu lintas sektor	10	12	100
		Jumlah bibit yang didistribusikan	5.000 bibit pohon	5.000 bibit pohon	100
		Jumlah kampanye lingkungan	1	2	100
		Jumlah sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan	11 kali sosialisasi yaitu : 5 kali sosialisasi, 3 kali koordinasi, 1 kali evaluasi Adiwiyata kabupaten, 1 kali Adiwiyata Propinsi dan 1 kali Adiwiyata Nasional	11 kali sosialisasi yaitu : 5 kali sosialisasi, 3 kali koordinasi, 1 kali evaluasi Adiwiyata kabupaten, 1 kali Adiwiyata Propinsi dan 1 kali Adiwiyata Nasional	100
		Jumlah peserta sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan	300	300	100
4.	Tersedianya data dan informasi lingkungan yang	Jumlah laporan inventarisasi lingkungan hidup	1 laporan	1 laporan	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
	dapat diakses masyarakat	Jumlah dokumen/buku Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	10 buku	10 buku	100
		Jumlah penyusunan Sistem informasi dan <i>database</i> lingkungan hidup	10 buku basis data, 1 paket software	10 buku basis data, 1 paket software	100
		Jumlah film kampanye lingkungan	-	-	-
		Informasi Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	1200 Ha	1200 Ha	100
		Jumlah Dokumen/buku Profil keanekaragaman Hayati kabupaten Bandung	1 buku	1 buku	100
		Jumlah Dokumen/Buku Pengelolaan Tutupan Vegetasi Kabupaten Bandung	1 buku	1 buku	100
		5.	Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang ditertibkan	22 usaha/kegiatan
Presentase penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa lingkungan di bidang lingkungan hidup	100%	100%		100	
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Terkelolanya sarana komunal untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Terwujudnya laboratorium lingkungan yang profesional 	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah komunal yang dibangun pemerintah	1 alat pengolahan air sungai	1 alat pengolahan air sungai	100
		Jumlah sarana dan sarana pengelolaan sampah	65 sarana yaitu: pengadaan sarana pengelolaan sampah (40 buah tong sampah, 25 buah komposter, 50 buah pot bunga.	60 sarana yaitu : 35 tempat sampah terpilah, 25 komposter, 50 pot bunga, 50 pohon pucuk merah	100
		Status akreditasi laboratorium dan sertifikasi personel	90%	90%	100
		Status registrasi laboratorium lingkungan	90%	90%	100

Tabel 2-2 Rincian Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2015	Realisasi s.d. Tahun 2014	%	%)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan actual	Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	7	5	71	71
2.	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Presentase cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen/izin lingkungan	20%	0	0	0
		Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	65%	66% (PPA 55%, PPU 85%, PLB3 60%)	94	92,3 85,7
		Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90%	97,5%	108	108
3.	Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perolehan Nilai Adipura	74	71,22	0.96	
		Jumlah masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas	2.700	3480	128	85
		Jumlah Lubang Resapan Biopori yang dibuat masyarakat	38.000	37.500	100	98
4.	Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat	Jenis dokumen yang dapat diakses	5	3	60	60
		Luas tanah (ha) untuk produksi biomassa yang dipantau status kerusakannya	1.500	1200	100	80
5.	Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Persentase kegiatan penertiban pelanggaran hukum lingkungan	100%	100%	100	60 ²⁾
		Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup	100%	100%	100	60 ²⁾
6.	Mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji	80%	75 %	93,75	94
		Jumlah sarana pengolahan limbah yang dibangun pemerintah	7	6	85	85

Keterangan:

*) konversi kepada pencapaian tahun 2015 untuk target yang bukan merupakan nilai akumulasi

¹⁾ persentase diperhitungkan dengan pencapaiannya pada tahun 2013²⁾ obyek penertiban dan kasus sengketa setiap tahun dapat berbeda, walaupun target setiap tahun sama

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2015	Realisasi s.d. Tahun 2014	%	%(*)
-----	--------	-------------------------------	-------------------	---------------------------	---	------

Berdasarkan Tabel 2-2, maka hasil analisis pencapaian sasaran melalui IKU rata-rata terhadap target pada tahun 2014 adalah 66,18%. Dengan demikian, maka untuk mencapai IKU pada tahun 2015 dibutuhkan pencapaian sekira 34% terhadap target.

Berikut rincian dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian misi BPLH.

2.2.1 Misi ke-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Proaktif di Bidang Lingkungan Hidup

Misi ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi BPLH Kabupaten Bandung, khususnya dalam hal ketersediaan produk hukum atau bahan lain sebagai acuan penyusunan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2014 pencapaian misi ke-1 ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu "Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup".

2.2.1.1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini terdiri dari pekerjaan Penyusunan DED IPAL Komunal, penyusunan dokumen evaluasi program dan kegiatan pengelolaan anak-anak sungai Citarum, penyusunan dokumen review kelayakan pengelolaan IPAL Cisirung, Penyusunan kajian pengelolaan limbah B3 beserta subkegiatan koordinasi untuk masing-masing pekerjaan tersebut.

Kegiatan ini baru diselenggarakan pada tahun 2012. Pada tahun 2014, kegiatan ini merupakan mendukung misi ke-1 sebesar 100%.

2.2.2 Misi ke-2: Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pada tahun 2014 pencapaian misi ini diimplementasikan pada 3 (tiga) kegiatan dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut adalah: Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, dan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran.

2.2.2.1 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pencapaian kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebanyak 14 IK, yaitu:

- a. Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi (200 industri)
- b. Jumlah lokasi pengujian kualitas air sungai;(75 lokasi)
- c. Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien;(10 lokasi)
- d. Jumlah peningkatan kapasitas dan personil pengawas;(3 personil)
- e. Persentase industri yang dibina/diawasi yang memiliki IPAL;(94%)
- f. Persentase industri yang dibina/diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara;(97%)
- g. Persentase industri yang dibina/diawasi yang memiliki TPS limbah B3;

- h. Persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran air industri;(50%)
- i. Persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak industri;(86%)
- j. Persentase penataan teknis dan administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri;(44%)
- k. Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (SPM);
- l. Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak (SPM);(100%)
- m. Persentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus selain “cemar berat”;
- n. Persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu.(97,5%)

Kegiatan Pemantauan Kualitas lingkungan pada tahun 2014 terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu: pembinaan dan pengawasan, pemantauan kualitas lingkungan,serta koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas pembina dan pengawas. Dengan berpedoman pada 14 indikator kinerja di atas, maka capaian kegiatan ini rata-rata 96,6% terdiri dari 7 indikator yang terealisasi 100%, 5 indikator yang terealisasi di atas 100% dan 2 indikator yang terealisasi di bawah 100%.

Empat indikator yang terealisasi di atas 100% adalah jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi; persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara, persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki TPS limbah B3, persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara, dan persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu. Realisasi di atas 100% karena ada beberapa usaha/kegiatan baru yang menjadi prioritas sehubungan dengan dokumen lingkungannya baru terbit atau datanya baru diperoleh dari SKPD dan/atau bidang lain dan meningkatnya penataan teknis usaha/kegiatan akibat pembinaan dan pengawasan yang intensif.

Sementara itu, 2 indikator yang tidak terealisasi 100% adalah persentase penataan teknis administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri dan presentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus selain “cemar berat”. Apabila dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk yang tercapai lebih dari 100%, khususnya dalam kepemilikan TPS limbah B3, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya industri memenuhi penataan teknis, namun belum sepenuhnya menaati ketentuan administrasi berupa perizinan dan pelaporan. Sementara itu, penurunan kualitas air yang ditandai dengan 75 (100%) lokasi sungai yang dipantauberstatus “cemar berat” menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan hanya merupakan salah satu alat pengendalian pencemaran air, selain pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah, penyusunan produk hukum, sosialisasi yang intensif, dan koordinasi serta pembagian peran yang jelas antara berbagai pemangku kepentingan.

Dari 14 indikator kinerja, target 3 indikator tetap untuk tahun 2011 dan 2012, yaitu jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi, jumlah lokasi pengujian kualitas air sungai, dan jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien dengan realisasi di atas 100% atau 100%. Target 6 indikator lebih tinggi daripada tahun 2011 dan 2012, yaitu:

presentase industri yang memiliki IPAL, alat pengendali pencemaran udara, dan TPS limbah B3 (target masing-masing indikator pada tahun 2011 adalah 70%, pada tahun 2012 adalah 75%, pada tahun 2013 adalah 95%, dan pada tahun 2014 adalah 100%), pemenuhan SPM pencegahan pencemaran air dan pencegahan pencemaran udara (tahun 2011 adalah 60%, tahun 2012 80%, tahun 2013 100%, dan tahun 2014 100%), dan persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu (tahun 2011 dan 2012 80%, tahun 2013 90%, dan tahun 2014 100%), namun dengan pencapaian yang umumnya masing-masing 100% atau lebih dari 100%. Dengan demikian, maka nampak bahwa dengan target yang ditingkatkan pada tahun 2014, realisasi tercapai 100%. Hal ini berarti ada upaya peningkatan penerapan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran lingkungan dari usaha/kegiatan sebagai hasil dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan selama ini.

Namun demikian, terdapat pula 5 indikator yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, yaitu jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas, persentase penerapan teknis dan administrasi PPA, PPU, dan PLB3; dan persentase lokasi pengujian kualitas air yang berstatus selain “cemar berat” yang mengindikasikan perlunya upaya pengendalian pencemaran lingkungan dalam skema lain.

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan berkontribusi pada pencapaian misi sekira 55%.

2.2.2.1 Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Pencapaian kinerja kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan ditentukan melalui persentase lahan yang ditentukan status kerusakannya untuk produksi biomassa. Kinerja ini menjadi salah satu kinerja SPM bidang lingkungan hidup. Dengan berpedoman pada indikator kinerja utama, maka capaian kegiatan ini untuk tahun 2014 adalah 80% atau 1200 Ha. Angka ini didasarkan pada target SPM yang harus dicapai, yaitu pada luas lahan atau tanah dengan potensi rusak tinggi (1500 Ha). Pemantauan dan evaluasi tanah untuk produksi biomassa dengan potensi rusak tinggi dilakukan pada lahan perkebunan di Kecamatan Pangalengan. Sesuai dengan target, maka realisasi kegiatan ini adalah 100%.

Penentuan potensi kerusakan tanah dilakukan dengan mengelompokkan akumulasi skor pembobotan, yaitu hasil kali skor dengan bobot masing-masing peta tematik (kemiringan, curah hujan, tata guna lahan, dan jumlah tanah). Pada prinsipnya semakin tinggi nilai skor yang diberikan, semakin tinggi pula potensi wilayah tersebut mengalami kerusakan tanah.

Kegiatan tahun 2014 ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang sama pada tahun 2013. Target persentase informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa untuk tahun 2013 adalah 67% atau 800 Ha pada tanah untuk produksi biomassa pada kategori potensi rusak tinggi di Kecamatan Pangalengan. Dengan demikian, maka pencapaian kinerja untuk tahun 2014 maupun 2013 adalah sama, yaitu 100%.

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan berkontribusi pada pencapaian misi ke-2 sebesar 30%.

2.2.2.2 Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Kegiatan ini diukur kinerjanya melalui 2 indikator, yaitu jumlah sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan dan jumlah peserta sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan. Dari target pelaksanaan, yaitu 5 (lima) kali sosialisasi dengan 350 peserta terealisasi 100%. Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan bagian dari pembinaan kepada penanggung jawab/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan umumnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan khususnya. Sosialisasi ini secara langsung meningkatkan realisasi untuk indikator peningkatan persentase penataan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara, dan kepemilikan IPAL, alat pengendali pencemaran udara, dan TPS limbah B3 pada kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Realisasi kegiatan ini pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah sama, yaitu 100%. Namun ada sedikit perbedaannya, yaitu bahwa dalam tahun 2011 dan 2014 jumlah sosialisasi ditargetkan dilaksanakan 5 kali dengan jumlah peserta 350 orang, sementara pada tahun 2012 dan 2013 adalah 4 kali dengan jumlah peserta 350 orang. Dengan demikian, maka pada tahun 2012 dan 2013 untuk setiap sosialisasi jumlah peserta yang menghadiri lebih banyak.

Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran, berkontribusi pada pencapaian misi ke-2 sekira 15%.

2.2.3 Misi ke-3: Melaksanakan koordinasi dan Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Integrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Program-Program Pengelolaan Lingkungan

Misi ini dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa proses pembangunan bukanlah merupakan tugas pemerintah semata, melainkan tugas semua komponen masyarakat tak terkecuali dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung yang juga merupakan bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup nasional.

Pencapaian misi ini dapat dilihat melalui indikator kinerja yaitu terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan lingkungan, dan diaplikasikan melalui 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

2.2.3.1 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Subkegiatan Penilaian Kota Sehat Adipura ini adalah: 6 kali rapat, Sosialisasi dan pelatihan sebanyak 7 kali, 1 kali penyelenggaraan lomba “RW-ku Bersih” dan 1 kali penyelenggaraan lomba “Sekolah-ku Bersih”, 2 kali Operasi Bersih, 18 kali monitoring dan pembinaan titik pantau, koordinasi sebanyak 31 kali, penanaman pohon sebanyak 1 kali, Pembinaan kader lingkungan 2 kali.

Perolehan nilai Adipura Kota Soreang periode tahun 2013-2014 adalah 71,26, masih di bawah target yang ditetapkan yakni 74,00, dengan rincian penilai 2,81 dari tahun sebelumnya. Namun penghargaan Adipura belum dapat diperoleh karena *passing grade* nilai untuk memperoleh penghargaan tersebut adalah 74. Kelemahan dari kecilnya nilai fisik adalah belum memadainya kriteria fisik seperti kondisi drainase, sarana kebersihan, trotoar, pengolahan sampah 3R, keberadaan Bank Sampah, dan kebersihan di beberapa titik pantau. Sedangkan untuk nilai non fisik, nilai yang masih

rendah adalah nilai institusi karena dukungan dana APBD untuk program Adipura dan lingkungan hidup dinilai masih rendah.

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat, berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sekira 30%.

2.2.3.2 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Subkegiatan Rapat Koordinasi

Subbagian dari Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yaitu penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan merupakan salah satu subkegiatan yang mendorong sasaran ke-3. Pada tahun (2014) telah dilaksanakan 20 rapat koordinasi, dengan pencapaian 100% terhadap target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, maka pencapaian adalah sama 100% dengan target dan realisasi yang berbeda (tahun 2011 7 kali dan tahun 2013 13 kali penyelenggaraan rapat. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan ini pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan topik/isu strategis pengendalian pencemaran lingkungan pada tahun yang bersangkutan.

Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sekira 5%.

2.2.3.3 Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi/penyuluhan penunjang program terpadu lintas sektor. Pada tahun 2014 pencapaian target kegiatan ini sebesar 100% dengan melaksanakan Penunjang Program Terpadu Lintas Sektor (Bakti Manunggal Satata Sariksa atau BMMS, TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD, Posyandu, Bulan Bakti Gotong Royong atau BBGR, Peingkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera atau P2WKSS, dan Kesatuan Gerak atau Kesrak PKK), berupa bimbingan teknis tentang biopori dan komposter, bantuan alat dan bibit; serta terselenggaranya kampanye lingkungan berupa pameran dan peringatan hari lingkungan hidup. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Tahun 2013 adalah sosialisasi Program Kampung Iklim dan Kampung Konservasi. Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun namun dengan lokasi yang berbeda seperti tercantum dalam Tabel 3-3.

Tabel 2-3: Perbandingan Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Tahun 2013 dan 2014

No.	Kegiatan	2013		2014	
		Lokasi	Jenis Bantuan	Lokasi	Jenis Bantuan
1.	P2WKSS	Ds. Warjabhakti Kec. Cimaung	12 buah bor biopori,	Ds. Mandalawangi Kec. Nagrek	12 buah bor biopori,5000
2.	TMMD	Ds. Cikoneng dan Ds. Mekaraksana Kec. Ciparay	3000 bibit tanaman, 12 unit komposter skala rumah tangga	Ds. Campakamulya Kec. Cimaung	bibit tanaman,400 tanaman TOGA
3.	BBGR dan HKG	Ds. Sadu Kec. Soreang	10 unit takakura	Ds. Nagrog Kec. Cicalengka	12 unit komposter skala rumah tangga.
4.	Posyandu	Ds. Rancakasumba Kec. Solokan Jeruk		Ds. Nagrak Kec. Pacet	
5.	Kesrak PKK			Ds. Cibodas Kec. Kutawaringin	

6.	BSMSS	Ds. Mandalawangi Kec. Nagrek		Ds. Cibodas, Kec. Kutawaringin	
7.	Program Kampung Iklim	Ds. Lamajang dan Ds. Pulosari Kec. Pangalengan			
8.	SAKA kalpataru			Bale Sawala Kab. Bandung	
9	SAKA Kalpataru			Kwarcab Kab. Bandung	
10	PPLH			SMP Pasirjambu	
11	PPLH			SMP Margahayu	
12	Agroforesty			Desa Pulosari Kec. Pangalengan	
13	Ecovillage			BPLH Kab. Bandung	

Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sekira 20%.

2.2.3.4 Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

Indikator kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi upaya konservasi sumber daya alam. Pencapaian target kegiatan ini adalah 100% dengan terselenggaranya Sosialisasi Upaya Konservasi Air yang diikuti oleh 280 peserta di Desa Margahayu selatan Kec. Margahayu, Kec. Katapang, Kec. Solokan Jeruk, Desa Ciapus Kec. Banjaran, Kec. Pameungpeuk, Desa Cangkuang Kec. Cangkuang, Desa Bojongsari Kec. Bojongsoang. Terselenggaranya 2 (dua) kali pembersihan lingkungan/sungai, yaitu di S. Citarum Desa padamulya, Ds. Majalaya, Ds. Sukamaju dan Ds. Majaserta Kec. Majalaya. Korve missal sepanjang jalan Kopo mulai dari Jl. Sayati hingga jembatan Sungai Citarum.

Dibandingkan tahun 2013, kegiatan ini tidak ada perbedaan, selain lokasi pelaksanaannya yang berbeda dan keikutsertaan kegiatan pembersihan sungai melibatkan dan bekerjasama dengan Lanud Sulaeman. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan air dan sumber sumber air berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sebesar 20%

2.2.3.5 Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Indikator kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) kepada 300 warga sekolah.

Kegiatan ini merupakan gambaran terjadinya sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program pengelolaan lingkungan, dalam hal ini antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan warga sekolah khususnya dan masyarakat di sekitar sekolah yang mendapat pembinaan Program SBL dan Adiwiyata.

Pada tahun 2014 target kegiatan ini adalah penyelenggaraan 5 kali sosialisasi SBL dengan peserta sebanyak 300 orang dengan melibatkan perwakilan sekolah berbagai tingkatan, Lokasi kegiatan adalah SMPN 1 Cimaung, SMAN 1, Margahayu, SMAN 1 Cicalengka, SMAN 1 Baleendah dan SMPN 1 Margahayu.

Selain sosialisasi/pembinaan SBL juga dilaksanakan evaluasi/penilaian Program Adiwiyata/SBL tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional. Kegiatan ini bila dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 capaian target kinerjanya adalah sama yaitu 100%, namun dengan jumlah dan lokasi sekolah binaan yang berbeda sebagai berikut:

Tabel 2-4 Daftar Penghargaan Program Adiwiyata/SBL Tahun 2013

No.	Penghargaan Tingkat Kabupaten	Penghargaan Tingkat Provinsi	Penghargaan Tingkat Nasional
1.	SD. Talenta	SD Talenta	SD Alam Pelopor
2.	SD. Percobaan Cileunyi	SMPN 1 Ciparay	SMPN 1 Cimaung
3.	SMPN 1 Ciparay	SMPN 2 Cileunyi	SMPN 1 Nagrek
4.	SMPN 1 Cileunyi	SMAN 1 Margahayu	
5.	SMPN 2 Cileunyi		
6.	SMPN 3 Baleendah		
7.	SMPN 1 Margaasih		
8.	SMP Sandhy Putra		
9.	SMP Karya Bhakti		

Tabel 2-5 Daftar Penghargaan Program Adiwiyata/SBL Tahun 2014

No.	Penghargaan Tingkat Kabupaten	Penghargaan Tingkat Provinsi	Penghargaan Tingkat Nasional
1	SD. Galih Pawarti	SMPN 3 Baleendah	SD Talenta
2	SD. Al Maburur	SMPN 1 Margaasih	SMPN 1 Ciparay
3	SD. Ibum Kamojang	SMP Sandhy Putra	SMPN 2 Cileunyi
4	SMPN 1 Pangalengan	SMP karya Bhakti	SMAN 1 Margahayu
5	SMPN 4 Pangalengan	SMPN 1 Katapang	
6	SMPN 1 dayeukolot		
7	SMPN 1 Katapang		
8	SMPN 1 Pasirjambu		
9	SMPN 2 Kertasari		
10	SMAN 1 Baleendah		
11	SMAN 1 Cicalengka		

Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, berkontribusi pada pencapaian misi ke-3 sekira 25%.

2.2.4 Misi ke-4: Mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Misi ini dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa proses pembangunan khususnya di bidang lingkungan hidup, akan optimal apabila didukung oleh ketersediaan data dan informasi mengenai potensi maupun permasalahan lingkungan hidup yang akurat dan dapat diakses masyarakat. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan melalui Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dengan dukungan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik.

2.2.4.1 Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan berkontribusi pada pencapaian misi ke-4, khususnya untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada tahun 2014 informasi ini belum menjadi bagian dari informasi BPLH yang dapat diakses melalui internet, sehingga pencapaiannya masih 0.

Kegiatan ini berkontribusi sekira 15% pada misi ke-4.

2.2.4.2 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Untuk Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan telah disusun 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

- a. Jumlah laporan inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Jumlah dokumen/buku Status Lingkungan Hidup (SLH) Kabupaten Bandung;
- c. Jumlah Penyusunan Sistem Informasi dan Database Lingkungan Hidup;
- d. Jumlah film kampanye lingkungan.
- e. Jumlah dokumen/buku Pengelolaan Tutupan Vegetasi
- f. Jumlah dokumen/buku Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2014 ditetapkan 6 indikator, yaitu jumlah laporan inventarisasi lingkungan, jumlah buku SLH Kabupaten Bandung Tahun 2013, dan jumlah system informasi lingkungan dan database lingkungan hidup, penyusunan pengelolaan tutupan vegetasi dan profil keanekaragaman hayati. Ketiga indikator kinerja tersebut terealisasi 100%. Pada Tahun 2011, melalui 3 indikator (laporan inventarisasi, buku SLH, dan film kampanye lingkungan, kegiatan ini juga terealisasi 100%. Sementara pada tahun 2012 indikator kegiatan ini hanya 2, tanpa film kampanye lingkungan. Sedangkan kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik sebagai pendukung misi ke-4 dalam penyediaan jaringan internet baru dilaksanakan pada tahun 2012 dan tahun 2013.

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan berkontribusi pada pencapaian misi ke-4 sekira 75%.

2.2.4.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik

Untuk tahun (2014) telah dilaksanakan pemasangan jaringan internet dengan sistem nirkabel untuk kelancaran akses dan publikasi data dan informasi. Kegiatan ini merupakan pendukung kegiatan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan yang berkontribusi sekira 10% pada pencapaian misi ke-4.

2.2.5 Misi ke- 5: Mengoptimalkan Penegakan Hukum Lingkungan

Misi ini diaplikasikan melalui Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan dimaksudkan untuk menggambarkan sejauhmana peranserta masyarakat khususnya penanggung jawab usaha/kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya pencapaian misike-5 ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:

- a. Terlaksananya penertiban ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.
Dari 22 usaha dan/atau kegiatan yang ditargetkan, pada tahun 2014 terlaksana 100%. Penetapan usaha dan/atau kegiatan tersebut didasarkan pada hasil koordinasi dengan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Perbandingan dengan tahun 2013 dari segi kuantitas jumlah usaha dan/atau kegiatan terjadi kenaikan, yaitu dari 16 usaha/kegiatan menjadi 22 usaha/kegiatan pada tahun 2014. Adapun pencapaian targetnya sama, yaitu 100%.
- b. Penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa di bidang lingkungan hidup.
Pada tahun 2014 terdapat 19 pengaduan yang masuk ke BPLH. Dari jumlah pengaduan tersebut, semuanya tertangani, sehingga persentase penanganan sebesar 100%. Jumlah pengaduan secara kuantitas mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang berjumlah sebanyak 17 pengaduan.

Misi ke-5 didukung oleh Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup sebesar 80%, sementara 20% nya adalah dari ketersediaan atau penambahan personil PPNS dan PPLHD.

2.2.6 Misi ke- 6: Mengembangkan Sarana dan Prasarana pendukung dalam Pengelolaan Lingkungan

Dalam rangka pencapaian misi ini ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja melalui 4 kegiatan.

2.2.6.1 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Subkegiatan penyediaan sarana pengelolaan sampah pada kegiatan ini menjadi salah satu pendukung pencapaian sasaran ke-6 ini. Pada tahun 2014 ini telah dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, berupa 35 unit tong sampah terpilah, 25 unit komposter, dan 50 pot bunga dan 50 pohon pucuk merah.

Subkegiatan ini berkontribusi pada pencapaian misi ke-6 sebanyak 5%.

2.2.6.2. Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Pada tahun 2014 telah disusun 3 (tiga) indikator kinerja dari kegiatan ini dalam pencapaian sasaran ke-6, yaitu:

- Persentase parameter pengujian kualitas air terhadap baku mutu parameter kualitas lingkungan
- Status Akreditasi laboratorium lingkungan
- Jumlah data kualitas lingkungan dari sampel kualitas air

Indikator kinerja yang pertama adalah persentase parameter pengujian kualitas air, dihitung dengan membandingkan jumlah kemampuan parameter pengujian terhadap jumlah parameter sesuai baku mutu yang ditentukan. Pada tahun 2014, persentase parameter pengujian kualitas air dibatasi untuk air limbah tekstil dan air permukaan.

Kemampuan jumlah parameter uji untuk pengujian kualitas air pada tahun 2014, 2013, 2012 jika dibandingkan jumlah parameter baku mutu tertera dalam tabel berikut :

No	tahun	Jumlah parameter limbah tekstil			Jumlah parameter air sungai		
		Yg di uji	sesuai baku mutu*)	Persentase	Yg diuji	sesuai baku mutu**)	Persentase

1	2012	9	9	100	21	46	45
2	2013	9	9	100	22	46	48
3	2014	9	9	100	31	46	67

Keterangan : *) Baku mutu limbah tekstil sesuai SK Gubernur Jabar nomor 6 tahun 1999, lampiran II

***) Baku mutu air sungai sesuai PP 82 Tahun 2001

Untuk pengujian limbah tekstil, persentase parameter pengujian terhadap jumlah parameter baku mutu sejak tahun 2012 telah tercapai 100 %, sedangkan persentase parameter air sungai meningkat dan pada tahun 2014 tercapai 67 %, sedangkan target persentase pengujian kualitas air ditetapkan 75%. Sehingga pencapaian indikator ini baru tercapai 89%. Belum tercapainya kinerja ini disebabkan masih terbatas sumber daya laboratorium khususnya peralatan/instrumen pengujian dan bahan kimia.

Indikator kinerja terpeliharanya status akreditasi laboratorium, dilaksanakan karena UPT Laboratorium Lingkungan sejak 30 Maret 2007 telah mendapatkan status akreditasi laboratorium berdasarkan ISO 17025:2005 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Setiap tahun laboratorium harus memelihara status akreditasi melalui unjuk kerja pada kegiatan tahunan survailen laboratorium yang dilakukan oleh asesor dari KAN. Tahun 2014 target kinerja pemeliharaan status akreditasi di UPT laboratorium Lingkungan ditetapkan 90%, mengingat proses survailen tersebut terkait dengan asesor Komite Akreditasi Nasional (KAN). Proses administrasi dan teknis laboratorium membutuhkan waktu setidaknya 4 (empat) bulan setelah pelaksanaan survailen.

Pelaksanaan survailen tahun 2014 untuk UPT Laboratorium telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2014, dari jadwal yang seharusnya tanggal 3 September 2014. Survailen dari KAN dilakukan untuk menilai kompetensi laboratorium, sejauh mana kesesuaian persyaratan manajemen dan teknis dikendalikan untuk menjamin kepuasan customer. Sampai dengan 31 Desember 2014, pihak laboratorium masih menunggu Komite Akreditasi Nasional (KAN) menerbitkan surat rekomendasi status akreditasi. Pada tahun 2014 target pemeliharaan status akreditasi ditetapkan 90% dan karena sesuai dengan realisasinya maka pemeliharaan status akreditasi pada tahun 2014 telah tercapai 100%.

Jumlah data kualitas lingkungan dari sampel kualitas air ditetapkan sebagai indikator kinerja, untuk melihat kapasitas laboratorium dari sisi jumlah pengujian kualitas air. Sejak tahun 2012, 2013 dan 2014 jumlah pengujian kualitas air terealisasi diatas 100 %, karena jumlah sampel pengujian setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2012 target sampel 480 sampel terealisasi 481 sampel, sedangkan tahun 2013 dari target 480 sampel terealisasi 490 sampel. Target jumlah sampel kualitas air di tahun 2014 sebanyak 500 dan terealisasi 658 sampel kualitas air, lebih dari 120%.

Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air di tahun 2014, berasal dari kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan pencegahan pencemaran air di 60 industri, air sungai dari 75 anak sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung yang diambil sampelnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan sampel dari kegiatan lain yang berpotensi mencemari lingkungan.

Kegiatan pengujian kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair berkontribusi terhadap misi ke-6, sebesar 30%.

2.2.6.3 Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

Pada tahun 2014 telah disusun 2 (dua) indikator kinerja dari kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri dalam pencapaian sasaran ke-6, yaitu:

- a. Persentase parameter pengujian kualitas udara terhadap baku mutu parameter kualitas lingkungan
 - b. Jumlah data kualitas lingkungan dari sampel kualitas air udara
- Kemampuan jumlah parameter uji untuk pengujian kualitas udara ambien dan emisi pada tahun 2014, 2013, 2012 jika dibandingkan dengan jumlah parameter baku mutu tertera dalam tabel berikut :

No	tahun	Jumlah parameter udara ambien*)			Jumlah parameter udara emisi**)		
		Yg di uji	sesuai baku mutu	Persentase	Yg diuji	sesuai baku mutu	Persentase
1	2012	5	13	38	4	4	100
2	2013	5	13	38	4	4	100
3	2014	6	13	38	4	4	100

Keterangan : *) Baku mutu udara ambien sesuai PP 41 tahun 1999

***) Baku mutu udara emisi bahan bakar batubara sesuai Permen LH nomor 7 Tahun 2007

Sejak tahun 2012 kapasitas laboratorium dalam hal jumlah parameter uji udara ambien dan emisi tetap, karena belum ada penambahan sumber daya, baik peralatan, bahan kimia dan personel pengujian. Keterbatasan sumber daya menyebabkan parameter kualitas lingkungan khususnya parameter udara ambient yang mampu kita uji terbatas. Sedangkan untuk pengujian udara emisi laboratorium telah mampu menguji sesuai parameter baku mutu emisi dengan bahan bakar batu bara dan solar.

Kapasitas laboratorium dari sisi jumlah pengujian kualitas udara dari tahun 2012, 2013 dan 2014 , tertera pada tabel berikut :

No	Jenis sampel pengujian	Jumlah sampel/tahun					
		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Udara ambien	10	10	10	10	10	66
2	Udara emisi	15	15	30	39	39	56

Untuk pengujian udara ambien, tahun 2012 s/d 2014 jumlah lokasi sampel pengujian terealisasi 100 %, sedangkan untuk pengujian udara emisi pada tahun 2012 terealisasi 100 % dan pada tahun 2013 dan 2014 jumlah pengujian udara emisi terealisasi diatas 100% dari target pengujian.

Kegiatan pengambilan sampel udara ambien dilaksanakan untuk mengetahui kualitas udara dilokasi padat transportasi (Kopo Sayati), daerah Majalaya dan Dayeuhkolot untuk mewakili daerah padat industri dan Tempat Pembuangan

Sampah Akhir (TPA) Babakan Ciparay untuk mengetahui kualitas udara ambien disekitar TPA. Sedangkan kegiatan pengujian udara emisi adalah pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan pencegahan pencemaran udara, dimana pada tahun 2014 target kegiatan SPM sebanyak 40 sampel udara emisi cerobong industri.

Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktivitas Industri berkontribusi terhadap misi ke-6, sebesar 30%.

2.2.6.4 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Pada tahun 2014 telah disusun 1 (satu) indikator kinerja dari kegiatan ini dalam pencapaian sasaran ke-6, yaitu: Terpenuhinya persyaratan sarana prasarana sesuai Permen LH nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. Pada tahun 2014 melalui kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan dilaksanakan pengadaan alat laboratorium kimia berupa 1 unit Atomic Absorber Spectrophotometer, untuk pengujian kadar logam di dalam air.

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan berkontribusi terhadap misi ke-6, sebesar 20%. Sehingga ketiga kegiatan yang dilaksanakan tersebut berkontribusi pada misi ke-6 sekira 80 %.

2.2.6.5. Kegiatan alat penjernih air

Pada tahun 2014 kegiatan ini tidak dilakukan.

Perhitungan pencapaian realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kinerja pada tahun 2014 tercantum dalam Tabel 3-6.

Tabel 3-6 Pencapaian Realisasi Kegiatan Tahun 2014

No.	Misi	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Nilai
		Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	100%	100 %
		Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	0	0	
2.	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;	Pemantauan Kualitas Lingkungan,	96,6%	55%	98,1%
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (kegiatan)	100%	30%	
		Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	100%	15%	
3.	Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan;	Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura,	100%	30%	100%
		Pemantauan Kualitas Lingkungan (Sub Kegiatan Rapat Koordinasi)	100%	5%	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam,	100%	20%	
		Peningkatan Konservasi DTA dan Sumber-Sumber Air,	100%	20%	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	100%	25%	

No.	Misi	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Nilai
4.	Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	10%	80%
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (informasi)	0%	20%	
		Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	100%	70%	
5.	Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	100%
		Pengembangan kapasitas Personil Untuk Pendidikan PPLH dan PPNS	0	0	
6.	Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan	Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	100%	5%	90%
		Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair,	90,8%	90%	
		Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	89,8%	90%	
		Alat penjernih air			

Berdasarkan Tabel 3-6 dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mendukung misi BPLH Kabupaten Bandung adalah 93 % .

2.3 Akuntabilitas Keuangan

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pendapatan

Untuk tahun anggaran 2014 BPLH tidak mengelola pendapatan.

2.3.2 Belanja

Rencana Belanja BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2014 berdasarkan perubahan APBD tahun 2014 adalah sebesar Rp11,338,467,500 terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp 4,553,176,000; Belanja Langsung sebesar Rp 6,785,291,500 , yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 662,265,000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4,366,321,500, dan Belanja Modal sebesar Rp.1,756,705,000.

Rencana dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tertuang dalam Tabel 3-7 berikut.

Tabel 2-7 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung BPLH Tahun 2014

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	4,553,176,000					
	Belanja Pegawai	4,553,176,000	3,914,437,283	85,97%			
2.	Belanja Langsung :				6,785,291,500	6,275,360,323	
	Belanja Pegawai				662,265,000	659,555,000	

	Belanja Barang/jasa				4,366,321,500	3,955,443,073	
	Belanja Modal				1,756,705,000	1,660,362,250	
	Jumlah				6,785,291,500	6,275,360,323	92,48%

Dari target belanja BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2014 sebesar Rp.11,338,467,500 (setelah perubahan anggaran) dapat direalisasikan sebesar Rp.10,189,797,606 (92,48%) dengan sisa Rp.1.148,669,894. Anggaran tidak terserap seluruhnya diakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Adanya sisa pembayaran Gaji
- Adanya efisiensi beberapa kegiatan dan sisa lelang tanpa mengurangi volume fisik yang telah direncanakan.

Adapun Rincian Belanja dan Realisasi berdasarkan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3-8.

Tabel 2-8 Rincian Rencana dan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	11,338,467,500	10,189,797,606	1,148,669,894
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,553,176,000	3,914,437,283	638,738,717
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,553,176,000	3,914,437,283	638,738,717
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3,720,187,000	3,104,523,373	615,663,627
1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	832,989,000	809,913,910	23,075,090
	BELANJA LANGSUNG	6,785,291,500	6,275,360,323	509,931,177
1.08.1.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	648,943,500	599,689,249	49,254,251
1.08.1.08.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33,600,000	21,889,249	11,710,751
1.08.1.08.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,600,000	21,889,249	11,710,751
1.08.1.08.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	47,489,000	47,059,500	429,500
1.08.1.08.01.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	27,000,000	27,000,000	-
1.08.1.08.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,489,000	20,059,500	-
1.08.1.08.01.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	47,500,000	44,725,000	-
	Belanja Barang dan Jasa	47,500,000	44,725,000	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	58,434,500	57,976,000	458,500
1.08.1.08.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	1,080,000	1,080,000	-
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57,354,500	56,896,000	458,500
1.08.1.08.01.01.11	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	42,750,000	40,820,500	1,929,500
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,750,000	40,820,500	1,929,500
1.08.1.08.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	42,750,000	40,820,500	1,929,500
1.08.1.08.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN	7,125,000	6,815,000	310,000
1.08.1.08.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,125,000	6,815,000	310,000
1.08.1.08.01.01.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	190,000,000	189,136,000	864,000
1.08.1.08.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	190,000,000	189,136,000	864,000
1.08.1.08.01.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5,700,000	5,700,000	-
1.08.1.08.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,700,000	5,700,000	-
1.08.1.08.01.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28,500,000	21,600,000	6,900,000
1.08.1.08.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,500,000	21,600,000	6,900,000
1.08.1.08.01.01.18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KELUAR DAERAH	124,670,000	103,830,500	20,839,500
1.08.1.08.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124,670,000	103,830,500	20,839,500
1.08.1.08.01.01.20	RAPAT-RAPAT KOORDINASI & KONSULTASI KEDALAM DAERAH	63,175,000	57,362,500	5,812,500
1.08.1.08.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,175,000	57,362,500	5,812,500
1.08.1.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	857,648,000	765,209,589	92,438,411
1.08.1.08.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	420,750,000	405,616,250	15,133,750
1.08.1.08.01.02.05.2.3	Belanja Modal	420,750,000	405,616,250	15,133,750

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.02.22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	225,500,000	220,900,000	4,600,000
1.08.1.08.01.02.22.5.2.3	Belanja Modal	225,500,000	220,900,000	4,600,000
1.08.1.08.01.02.24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN KANTOR	211,398,000	138,693,339	72,704,661
1.08.1.08.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211,398,000	138,693,339	72,704,661
1.08.1.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,700,000	25,500,000	200,000
1.08.1.08.01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11,400,000	11,340,000	60,000
1.08.1.08.01.06.01.5.2.1	Belanja Pegawai	6,460,000	6,400,000	60,000
1.08.1.08.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,940,000	6,400,000	60,000
1.08.1.08.01.06.02	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	9,500,000	9,360,000	140,000
1.08.1.08.01.06.02.5.2.1	Belanja Pegawai	3,300,000	3,300,000	-
1.08.1.08.01.06.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,200,000	6,060,000	140,000
1.08.1.08.01.06.05	PENYUSUNAN RENCANA DAN PENGANGGARAN KEGIATAN	4,800,000	4,800,000	
	Belanja Pegawai	4,800,000	4,800,000	-
1.08.1.08.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,518,000,000	2,318,857,820	199,142,180
1.08.1.08.01.16.01	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA	285,000,000	280,452,500	4,547,500
1.08.1.08.01.16.01.5.2.1	Belanja Pegawai	97,070,000	97,020,000	50,000
1.08.1.08.01.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187,930,000	183,432,500	4,497,500
1.08.1.08.01.16.03	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	325,000,000	292,326,050	32,673,950
1.08.1.08.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	13,600,000	13,600,000	-
1.08.1.08.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	311,400,000	278,726,050	32,673,950
1.08.1.08.01.16.04	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	140,000,000	131,121,000	8,879,000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1.08.1.08.01.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140,000,000	131,121,000	8,879,000
1.08.1.08.01.16.12	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	712,000,000	675,537,770	36,462,230
1.08.1.08.01.16.12.5.2.1	Belanja Pegawai	103,400,000	103,400,000	-
1.08.1.08.01.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	608,600,000	572,137,770	36,462,230
1.08.1.08.01.16.14	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,056,000,000	939,420,500	116,579,500
1.08.1.08.01.16.14.5.2.1	Belanja Pegawai	150,980,000	150,980,000	-
1.08.1.08.01.16.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	905,020,000	788,440,500	116,579,500
1.08.1.08.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	697,500,000	647,426,500	50,073,500
1.08.1.08.01.17.06	PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN	201,000,000	177,346,500	23,653,500
1.08.1.08.01.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai	33,460,000	33,460,000	-
1.08.1.08.01.17.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167,540,000	143,886,500	23,653,500
1.08.1.08.01.17.07	PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER AIR	161,500,000	156,594,000	4,906,000
1.08.1.08.01.17.07.5.2.1	Belanja Pegawai	29,000,000	26,400,000	2,600,000
1.08.1.08.01.17.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132,500,000	130,194,000	2,306,000
1.08.1.08.01.17.10	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM	95,000,000	93,350,000	1,650,000
1.08.1.08.01.17.10.5.2.1	Belanja Pegawai	39,250,000	39,250,000	-
1.08.1.08.01.17.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,750,000	54,100,000	1,650,000
1.08.1.08.01.17.14	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA	240,000,000	220,136,000	19,864,000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1	Belanja Pegawai	45,400,000	45,400,000	-
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194,600,000	174,736,000	19,864,000
1.08.1.08.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMAL SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	430,000,000	420,444,000	9,556,000
1.08.1.08.01.19.02	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	430,000,000	420,444,000	9,556,000
1.08.1.08.01.19.02.5.2.1	Belanja Pegawai	12,865,000	12,865,000	-
1.08.1.08.01.19.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	417,135,000	407,579,000	9,556,000
1.08.1.08.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	1,607,500,000	1,498,233,165	109,266,835
1.08.1.08.01.20.02	PENGUJIAN EMISI/POLUSI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI	217,500,000	216,424,795	1,075,205
1.08.1.08.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131,085,000	130,013,295	1,071,705
1.08.1.08.01.20.02.5.2.3	Belanja Modal	86,415,000	86,411,500	3,500
1.08.1.08.01.20.03	PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR	500,000,000	493,018,370	6,981,630
1.08.1.08.01.20.03.5.2.1	Belanja Pegawai	38,200,000	38,200,000	-
1.08.1.08.01.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	375,750,000	369,209,870	6,540,130
1.08.1.08.01.20.03.5.2.3	Belanja Modal	86,050,000	85,608,500	441,500
1.08.1.08.01.20.05	PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN	140,000,000	114,090,000	25,910,000
1.08.1.08.01.20.05.5.2.1	Belanja Pegawai	56,400,000	56,400,000	-
1.08.1.08.01.20.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83,600,000	57,690,000	25,910,000
1.08.1.08.01.20.07	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN	750,000,000	674,700,000	75,300,000
1.08.1.08.01.20.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,010,000	2,010,000	-
1.08.1.08.01.20.07.5.2.3	Belanja Modal	747,990,000	672,690,000	75,300,000

2.4 . Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Bulan Mei 2015

Dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renja 2015, capaian kinerja sampai dengan bulan Mei 2015 pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Bulan Mei 2015

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja Renja Tahun 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Mei 2015	
			Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
2	3	6	7	8=(7/6)
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	100%		
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik	12	3	25.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan Kebersihan kantor	12	3	25.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor dan pengadaan suku cadang (Unit)	28	3	10.71
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)	44	4	9.09
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (lembar)	207,812.00	106,225.00	51.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	100		-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	15		-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya penyediaan media informasi	12		-
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai ,rapat dan tamu (OH)	432	63	14.58
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam propinsi dan ibu kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara (HOK)	420	10	2.38
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten	351	31	8.83
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	1	1	100.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%		-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung dan halaman kantor	100%		-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua (unit)	30	5	16.67
Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penunjang Kerja aparatur (%)	100%		-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penunjang Kerja aparatur (%)	100%		-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya tugas penyusunan dokumen-dokumen ,laporan-laporan dan rencana kerja SKPD	100%		-
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban SKPD	12		-
Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan	Tersedianya Sumber daya manusia dalam operasional SIMDA	24	2	8.33
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran lingkungan (75%); porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (100%)	100%		-
Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	Jumlah koordinasi dan sosialisasi dalam rangka Program Adipura Kota Soreang	34		-

Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terbina dan terawasinya usaha dan atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, terpantaunya kualitas lingkungan, dan tercapainya SPM Pencegahan Pencemaran Air dan Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak (Usaha/Kegiatan)	65%	20%	30.77
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. SPM :Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH	90%	10%	11.11
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan .	Tersusunnya juknis produksi Bersih Industri tekstil (proses dyeing - finishing) untuk mendukung 5 % peningkatan SPM/MDGs	100%		-
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup	Tersusunnya Produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	2		-
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada guru dan siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan masyarakat.(Orang)	300		-

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan AMDAL dan UKL-UPL	Pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL (Perusahaan)	100		-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase meningkatnya upaya konservasi air melalui biopori dan pembersihan sungai	100%		-
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersedianya buku status kerusakan tanah untuk produksi biomassa tahun 2015 dan profil pengelolaan tutupan vegetasi tahun 2015 dan Identifikasi calon lokasi Taman Kehati	100%		-
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber-sumber air	Terselenggaranya berbagai sosialisasi upaya konservasi sumber daya air.	9,000		-
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehati & meningkatnya kualitas dan kuantitas data kehati	7		-
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terselenggaranya berbagai sosialisasi upaya konservasi sumber daya alam	900		-
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (5 %)	100%		-

Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya referensi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bandung	2		-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan	100%		-
PENGUJIAN EMISI / POLUSI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI	Tersedianya hasil pengujian kualitas udara	208		-
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Tersedianya hasil pengujian kualitas air	600	6	1.00
Pembangunan Tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah komunal yang dibangun Pemerintah	3		-
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Terselenggaranya berbagai sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran air	6	1	16.67
Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan	Tersedianya peralatan AAS untuk pengujian logam	80%	5%	6.25
Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait masalah Lingkungan	Pengaduan masalah lingkungan oleh masyarakat	1		-
Program Perencanaan				

Pembangunan Daerah				
Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusann program dan kebijakan layanan public	Jumlah Kader Lingkungan Hidup di masyarakat	100	100	100.00

Sedangkan realisasi anggaran samapai dengan Bulan Mei 2015 adalah sebagai berikut:

Nama Kegiatan/Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi			
		Fisik %	Keuangan (Rp)	%	Sisa
2	7	10	11	12	13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	782,212,500	5%	41,275,330	5%	740,937,170
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	46,980,000	9%	4,330,330	9%	42,649,670
Penyediaan jasa kebersihan kantor	31,000,000			0%	31,000,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30,000,000	6%	1,800,000	6%	28,200,000
Penyediaan alat tulis kantor	59,320,000	0.30%	180,000	0.30%	59,140,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41,562,500	51%	21,245,000	51%	20,317,500
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,850,000			0%	5,850,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	135,000,000			0%	135,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,800,000			0%	10,800,000
Penyediaan makanan dan minuman	17,000,000	7%	1,270,000	7%	15,730,000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270,000,000	2%	4,600,000	2%	265,400,000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	80,000,000	10%	7,850,000	10%	72,150,000
Penunjang Perayaan hari hari besar bersejarah	54,700,000			0%	54,700,000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparaturnya	317,360,000	2%	7,449,600	2%	309,910,400
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	190,000,000			0%	190,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127,360,000	6%	7,449,600	6%	119,910,400
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	53,700,000	0%	-	0%	53,700,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000			0%	25,000,000
Penyusunan laporan keuangan semesteran	21,500,000			0%	21,500,000
Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan	7,200,000			0%	7,200,000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,930,000,000	2%	49,695,950	2%	2,880,304,050
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	500,000,000			0%	500,000,000
Pemantauan Kualitas Lingkungan	1,325,000,000	6%	34,767,950	3%	1,290,232,050
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	250,000,000	15%	14,928,000	6%	235,072,000
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	75,000,000			0%	75,000,000
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup	500,000,000			0%	500,000,000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	200,000,000			0%	200,000,000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan AMDAL dan UKL-UPL	80,000,000			0%	80,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	600,000,000		-	0%	53,700,000
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	200,000,000			0%	200,000,000
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber-sumber air	150,000,000			0%	150,000,000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	250,000,000			0%	250,000,000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	300,000,000		-	0%	300,000,000
Pengembangan data dan informasi lingkungan	300,000,000			0%	300,000,000
Program peningkatan pengendalian polusi	2,797,353,500	3%	84,390,638	3%	2,712,962,862
Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industry	450,000,000	10%	8,298,500	2%	441,701,500
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	600,000,000	30%	40,348,000	7%	559,652,000
Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi	907,353,500			0%	907,353,500
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	250,000,000	32%	17,874,000	7%	232,126,000
Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan	390,000,000	20%	17,870,138	5%	372,129,862
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait masalah lingkungan	200,000,000			0%	200,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25,000,000	90%	22,500,000	90%	2,500,000
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	25,000,000	90%	22,500,000	90%	2,500,000

2.5 Permasalahan dan Pemecahan masalah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Tabel 2.3.1 Permasalahan, Solusi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan BPLH Tahun 2015

No	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
1.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya penataan ruang Kota Soreang, sehingga belum ada pemanfaatan ruang kota yang serasi, optimal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sebagai wadah bagi penduduk dalam menjalankan berbagai kegiatan perkotaan. Saat ini masih terdapat pemukiman kumuh, kesemrawutan di pusat Kota Soreang (Pasar dan terminal), belum tertatanya PKL dan terbatasnya jaringan saluran drainase ▪ Masih banyaknya kriteria fisik yang harus diperbaiki, terutama dalam penghijauan kota, penyediaan tempat sampah terpilah 3 warna, dan sarana 3R ▪ Belum dipahaminya oleh semua komponen masyarakat bahwa Program Adipura bukan merupakan program sesaat tetapi merupakan program yang berkelanjutan, ▪ Masih kurangnya peran aktif semua komponen masyarakat dan kontribusi SKPD terkait dalam mensukseskan program Adipura, ▪ Masih terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah ▪ Masih kurang memadainya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengadaan penghijauan, tempat sampah terpilah dan fasilitasi pembentukan bank sampah ▪ Peningkatan sosialisasi dan pembinaan terhadap titik pantau ▪ Peningkatan koordinasi dengan stake holder terkait dengan program adipura ▪ Peningkatan partisipasi pihak ke-3 dalam penghijauan dan penyediaan sarana pengumpulan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penghijauan, pengadaan sarana pengelolaan sampah, dan sosialisasi pengelolaan sampah ▪ Melaksanakan monitoring dan pembinaan titik pantau secara periodic ▪ Melaksanakan rapat koordinasi dengan stake holder terkait ▪ Melaksanakan sosialisasi program Adipura kepada pihak ke-3 (industri, developer, dan masyarakat);

No	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
		dukungan anggaran		
2.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih lambatnya peningkatan penataan penanggung jawab usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan ▪ Belum adanya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang sudah dilantik oleh Bupati Bandung). ▪ Kurangnya sarana mobilitas pembinaan dan pengawasan. ▪ Adanya parameter pengujian kualitas lingkungan yang belum dapat diuji oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH atau nilai hasil pengujian yang berbeda dengan laboratorium lain. ▪ Sulitnya mengevaluasi hasil kegiatan apabila dilakukan secara manual. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ▪ Mengikuti diklat PPLHD dan melantik PPLHD Kabupaten Bandung ▪ Adanya sarana mobilitas pembinaan dan pengawasan yang memadai, terutama dapat menjangkau wilayah yang jauh dengan medan yang berat ▪ Penambahan parameter pengujian dan selalu meningkatkan kinerja laboratorium ▪ Adanya sistem informasi lingkungan (SIL) yang didukung dengan hardware yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan lebih intensif; ▪ Mengajukan diklat PPLH dan mengajukan pelantikan PPLHD kepada BKPP Kabupaten Bandung ▪ Mengajukan penambahan anggaran sarana mobilitas pembinaan dan pengawasan ▪ Merekomendasikan UPT Laboratorium Lingkungan BPLH untuk mengajukan anggaran penambahan parameter pengujian dan selalu meningkatkan kinerja laboratorium ▪ Meningkatkan sistem informasi lingkungan (SIL) sehingga dapat menjadi sarana untuk melakukan evaluasi
3	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terbatasnya data aktual yang dapat dijadikan dasar penyusunan <i>Masterplan</i> IPAL Komunal ▪ Sulitnya implementasi pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah karena memerlukan anggaran yang besar dan kerap munculnya masalah non teknis di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan asumsi-asumsi yang logis sebagai pengganti tidak adanya data yang akurat dan aktual ▪ Mencari alternatif sumber dana dan melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat sekitar lokasi pembangunan infrastruktur air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara aktif mencari alternatif sumber data yang akurat dan aktual dari berbagai sumber ▪ Membuat surat pengajuan bantuan dana kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
4.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedianya perangkat hukum dalam operasional penegakan hukum lingkungan ▪ Tidak dimilikinya PPNS lingkungan hidup ▪ Kurangnya sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun draft perangkat hukum dalam operasional penegakan hukum lingkungan ▪ Penambahan personil untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan ▪ Penambahan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat dan mengajukan draft perangkat hukum dalam operasional penegakan hukum lingkungan ▪ Mengajukan untuk mengikuti diklat PPNS lingkungan hidup ▪ Mengajukan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
5.	Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoptimalkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan penambahan

No	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
	Produksi Ramah Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman industry terkait dengan kegiatan produksi bersih sehingga masih ada penolakan saat peninjauan proses produksi dan kurangnya data yang terkait dengan efisiensi proses produksi 	<ul style="list-style-type: none"> anggaran yg ada Melakukan pendekatan seoptimal mungkin kepada beberapa industri skala besar 	<ul style="list-style-type: none"> anggaran Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara periodik
6.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya parameter pengujian tanah yang belum dapat diuji oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH Kurangnya sarana mobilitas yang memadai untuk pembinaan dan pengawasan serta pemantauan Kurangnya SDM yang memiliki keterampilan teknis untuk pemantauan kerusakan tanah Belum tercapainya SPM pelayanan informasi kerusakan tanah untuk produksi biomassa 	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan anggaran penambahan sarana dan prasarana pengujian agar dapat melakukan pengujian tanah secara lengkap (uji fisika, kimia dan mikrobiologi) Mengajukan anggaran penambahan sarana mobilitas yang memadai untuk pembinaan dan pengawasan serta pemantauan Mengajukan pelatihan teknis terkait pemantauan kerusakan lahan/tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Tetap melaksanakan kegiatan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa Tetap mengajukan anggaran untuk kegiatan tersebut agar memenuhi SPM sesuai target pencapaian
7.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Program mitigasi perubahan iklim, yaitu Kampung Iklim (Proklam) dan Program Kampung Konservasi relatif masih baru Kurangnya data upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang akan diusulkan untuk Proklam 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sosialisasi dan pmdampingan kepada masyarakat terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi Proklam dan Kampung Konservasi Melaksanakan monitoing dan pendampingan secara berkala
8.	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya data aktual atau terlambatnya rilis data dari SKPD/dinas/instansi terkait Tidak sesuai format data pada SKPD/dinas/instansi terkait dengan format data pada pedoman Penyusunan SLHD Adanya format data yang tidak tersedia pada SKPD/Dinas/Instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Diperolehnya data aktual, sehingga memudahkan evaluasi Adanya format data yang sesuai atau hampir sesuai dari SKPD/Dinas/Instansi terkait Adanya kesesuaian format data yang tercantum dalam pedoman penyusunan SLHD dari KLH 	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan surat mengenai permohonan data dari awal tahun Merekomendasikan penyesuaian format data kepada SKPD/Dinas/Instansi terkait Memberi masukan kepada KLH sebagai penyusun pedoman untuk menyesuaikan format
9.	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya kemampuan parameter uji karena terbatasnya (jumlah dan jenis) alat uji udara ambien dan alat uji udara emisi 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan pengguna jasa dalam menetapkan parameter yang diuji, 	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan anggaran untuk pengadaan peralatan pengujian udara ambien dan udara emisi

No	Uraian Kegiatan	Permasalahan	Pemecahan Masalah	Tindak Lanjut
			agar disesuaikan dengan kemampuan laboratorium	
10.	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padan dan Limbah Cair	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya kemampuan parameter uji karena terbatasnya (jumlah dan jenis) alat uji kualitas air ▪ Laboratorium belum bisa melakukan pengujian untuk parameter B3 karena belum memiliki alat uji B3 ▪ Laboratorium belum bisa melakukan pengujian untuk sampel tanah karena belum memiliki alat sampling dan alat uji tanah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan pengguna jasa dalam menetapkan parameter yang diuji, agar disesuaikan dengan kemampuan laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan anggaran untuk melengkapi sarana prasarana pengujian yang belum ada. Khususnya alat uji B3 dan peralatan sampling dan uji tanah
11.	Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya peserta sosialisasi yang bukan pengambil keputusan ▪ Banyaknya isu aktual yang harus disosialisasikan, sementara anggaran terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menekankan dalam setiap sosialisasi dan mencantumkan pada undangan agar yang hadir adalah pimpinan, atau meminta yang hadir agar menyampaikan hasil sosialisasi kepada pimpinan ▪ Adanya anggaran yang memadai untuk mengakomodasi sosialisasi yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif ▪ Mengajukan anggaran yang lebih besar daripada anggaran tahun 2012 ▪ Memilih topik sosialisasi yang paling prioritas

2.6 Upaya Mengatasi Permasalahan Untuk Program dan Kegiatan tahun 2015

Untuk mengatasi permasalahan di atas disamping melakukan upaya penyelesaian dengan meningkatkan capaian kinerja dengan menggunakan seluruh sumber daya/ potensi yang dimiliki oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) ditindaklanjuti dengan melakukan revisi anggaran dengan melalui pergeseran anggaran pada kegiatan yang lebih memerlukan dukungan anggaran. Kemudian untuk mendukung kegiatan lembaga maka diajukan penambahan anggaran pada belanja SKPD untuk Alat Tulis Kantor, Peralatan Kantor dan Perbaikan kantor secara rinci anggaran yang perlu dilakukan perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.3 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2015

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	
			Pagu Indikatif

					n Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
-1					-2	-3	-4	-11	-12	(13) = 12 - 11
1	08	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)	59,320,000	129,320,000	70,000,000
1	08	1	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (lembar)	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (lembar)	41,562,500	71,562,500	30,000,000
1	08	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	135,000,000	135,000,000	-
1	08	1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung dan halaman kantor, dan pemeliharaan/rehab taman	Terlaksananya perbaikan gedung dan halaman kantor dan pemeliharaan/rehab taman	190,000,000	390,000,000	200,000,000
					JUMLAH			425,882,500	725,882,500	300,000,000

2.7 Penjelasan Tentang Usulan Program/Kegiatan SKPD

Usulan program kegiatan perubahan BPLH terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dalam rincian kebutuhan RKPD dan program meliputi pemenuhan kebutuhan manajemen dan kebutuhan penunjang untuk operasional kegiatan serta kebutuhan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung
 - a. Gaji dan tunjangan PNS
 - b. Uang makan dan minum pegawai
2. Belanja langsung
 - A. SKPD
 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

B. Program

1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Peningkatan pengendalian polusi

Rincian program dan kegiatannya terdapat dalam matrik rancangan hasil analisis kebutuhan Anggaran Perubahan BPLH Tahun 2015.

BAB III

VISI, MISI, RENCANA, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 dibuat dengan mengacu kepada Rencana Strategis BPLH yang disusun agar terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan BPLH serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPLH dimuat daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD Kabupaten Bandung dengan mengutamakan kewenangan bidang lingkungan hidup yang dimiliki serta sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Sebagai acuan dari pelaksanaan pembangunan, maka rencana Kerja Perubahan BPLH dimulai dari Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

3.1 Visi dan Misi

Dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015 BPLH memiliki visi sebagai berikut: **“Terwujudnya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang proaktif dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan”**.

Adapun penjelasan perumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Proaktif” memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti bahwa BPLH akan lebih aktif dan responsif dalam menjawab kondisi, tantangan dan permasalahan lingkungan hidup actual;
2. “Berperan” bahwa BPLH akan bertindak dan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dalam mengawal pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Agar visi dapat dicapai maka disusun misi yang merupakan suatu kebijakan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan strategis. Mengacu kepada visi di atas, maka BPLH menetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan;
4. Mengembangkan system informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;

6. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.

Secara umum penyelenggaraan visi dan misi BPLH Kabupaten Bandung tertuang dalam Rencana Strategis BPLH Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

3.2 Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPLH seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka BPLH Kabupaten Bandung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan BPLH Kabupaten Bandung untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Dari misi yang telah ditetapkan di atas, masing-masing memiliki tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari misi itu sendiri. Dengan adanya tujuan dimaksud menunjukkan adanya sinkronisasi antar faktor kunci keberhasilan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari misi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Program/Kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mendukung Misi BPLH

No.	Misi	Tujuan	Program/Kegiatan
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan aktual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengkajian Dampak Lingkungan ▪ Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ▪ Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
2.	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantauan Kualitas Lingkungan, ▪ Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (kegiatan) ▪ Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
3.	Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program lingkungan;	Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura, ▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, ▪ Peningkatan Konservasi DTA dan Sumber-Sumber Air, ▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

No.	Misi	Tujuan	Program/Kegiatan
			Pengendalian Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
4.	Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (informasi) ▪ Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
5.	Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;	Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup ▪ Pengembangan kapasitas Personil Untuk Pendidikan PPLH dan PPNS
6.	Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan	Mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura ▪ Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair, ▪ Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri

3.3 Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana BPLH Kabupaten Bandung telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (tahun 2015). Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 dapat dijelaskan pada Tabel 2-2.

Tabel 2-2 Indikator Kinerja Utama dan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target RPJMD Kabupaten Bandung Tahun Ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan aktual	Jumlah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup	3	0	1	2	1
2.	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Presentase cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen/izin lingkungan	20%	20%	20%	20%	20%
		Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan	45%	50%	55%	60%	65%

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target RPJMD Kabupaten Bandung Tahun Ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015
		Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perolehan Nilai Adipura	74	74	74	74	74
		Jumlah masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas	540	540	540	540	540
		Jumlah Lubang Resapan Biopori yang dibuat masyarakat	7.000	7.000	7.000	8.500	9.000
4.	Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat	Jenis dokumen yang dapat diakses	2	2	3	5	5
		Luas tanah (ha) untuk produksi biomassa yang dipantau status kerusakannya	600	800	1000	1200	1500
5.	Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Persentase kegiatan penertiban pelanggar hukum lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji	55%	60%	5%	75%	80%
		Jumlah sarana pengolahan limbah yang dibangun pemerintah	0	0	5	0	2

3.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran strategis BPLH merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis BPLH Kabupaten Bandung merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Tujuan 1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap kebijakan dan kondisi lingkungan aktual

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-3.

Tabel 2-3 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-1

Sasaran	Indikator Kinerja
Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup	Jumlah produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Persentase penyelesaian Petunjuk Teknis Produksi Bersih Industri Tekstil

Tujuan 2: Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-4.

Tabel 2-4 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-2

Sasaran	Indikator Kinerja
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi
	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki IPAL
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki alat pengendali pencemaran udara sumber tidak bergerak
	Persentase industri yang dibina dan diawasi yang memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
	Persentase pnaatan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran air industri
	Persentase pnaatan teknis dan administrasi pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak industri
	Persentase pnaatan teknis dan administrasi pengelolaan limbah padat dan B3 industri
	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air (SPM)
	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak (SPM)
	Jumlah sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan mengenai peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan hidup
	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan
	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan
Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien	
Persentase lokasi pengujian kualitas air sungai yang berstatus “cemar berat”	

Sasaran	Indikator Kinerja
	Persentase lokasi pengujian kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu
	Persentase informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa

Tujuan 3: Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-5.

Tabel 2-5 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-3

Sasaran	Indikator Kinerja
Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan lingkungan serta terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan para pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi dan sosialisasi dalam rangka program Adipura Kota Soreang
	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kebersihan di Kota Soreang (OPSIH /Operasi Bersih, Lomba Bersih-Hijau-Teduh, dan monitoring/pembinaan titik pantau)
	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Jumlah sosialisasi konservasi air (teknologi biopori)
	Jumlah bor biopori yang didistribusikan
	Jumlah kegiatan pembersihan sungai /lingkungan
	Jumlah sosialisasi/penyuluhan penunjang program terpadu lintas sektor ,PPLH/KSDA/Saka Kalpataru, Proklam, Ecovillage.
	Jumlah bibit yang didistribusikan
	Jumlah kampanye lingkungan berupa pameran dan peringatan hari Lingkungan Hidup
	Jumlah sosialisasi Sekolah Berbudaya Lingkungan

Tujuan 4: Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-6.

Tabel 3-3 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-4

Sasaran	Indikator Kinerja
Tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	Jumlah laporan inventarisasi lingkungan hidup
	Jumlah dokumen/buku Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
	Jumlah Sistem Informasi dan database lingkungan hidup
	Jumlah film kampanye lingkungan
	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Keanekaragaman hayati
	Jumlah Dokumen Penyusunan Pengelolaan Tutupan Vegetasi

Tujuan 5: Menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-7.

Tabel 2-7 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-5

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah (Persentase) kegiatan penertiban pelanggar hukum lingkungan
	Persentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup
	Persentase pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum dengan institusi penegak hukum lain
	Persentase pengembangan personil untuk pendidikan PPLH dan PPNS

Tujuan 6: Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-8.

Tabel 2-8 Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Misi Ke-6

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya laboratorium lingkungan yang professional	Status akreditasi laboratorium dan sertifikasi personil
	Status registrasi laboratorium lingkungan
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas air permukaan dan air limbah
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara ambien
	Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara emisi
Terkelolanya sarana komunal untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah komunal yang dibangun Pemerintah
	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah

3.5 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dibuat sejalan dengan Kebijakan Nasional, agar terjalin sinergitas program maka dilakukan dengan cara memadukan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan kebijakan Program Nasional Serta mengembalikan Sumber Daya yang Hilang:

- a. Kawasan tertutup hutan
- b. Kawasan perlindungan daratan
- c. Ratio penggunaan energi terhadap PDB
- d. Emisi CO₂
- e. Konsumsi CFC pengurangan Ozon
- f. Penggunaan Biomasa

Sementara itu sinergistik perencanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 telah mengisyaratkan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan "GREEN PROVINCE 2015" diarahkan kegiatannya pada:

1. peningkatan kualitas lingkungan yang meliputi: pemantauan berbasis masyarakat, penyelesaian kasus lingkungan, sertifikasi mutu pengaduan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas mutu air kelas4 tahun 2018, 60 hari baik dan 40 kasus LH
2. Daya dukung/ daya tampung dan mitigasi adaptasi kawasan lindung yang meliputi"
 - , daya dukung/daya tampung LH jabar
 - kemampuan dan ketahanan menghadapi perubahan iklim
 - PDRB hijau
 - Pengelolaan kawasan lindung

Yang diarahkan pada tercapainya target kinerja 40,1 % kawasan lindung
3. BPLHD centre excellent diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang meliputi:
 - ECO OFFICE (Green Mentality)
 - Citarum Centre of excellent
 - Laboratorium Lingkungan
 - Peningkatan SDM
 - Penyuluhan Lingkungai

Kebijakan tersebut di atas telah disikapi oleh kabupaten/kota di Jawa Barat dengan mengajukan kegerbagai usulan kegiatan sebagai bentuk dukungan

terhadap perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa barat, dan sebagai bentuk sinergitas perencanaan yang terpadu, kegiatan-kegiatan tersebut diusulkan sebagai kegiatan yang dapat dibiayai oleh APBN sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah. (usulan terlampir.)

3.6 Pembiayaan

Pembiayaan BPLH bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat dan dari APBN serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.7 Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan BPLH tahun 2015 mengacu dan sesuai arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2015 di bidang kesehatan, yang meliputi upaya Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas lingkungan sebagai Urusan Wajib kebijakan pembangunan kabupaten Bandung dalam pembangunan di bidang Lingkungan Hidup.

3.8 Penetapan Kinerja Tahun 2015

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mendapat dukungan anggaran tahun 2015 dengan penetapan Kinerja Sebagai Berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Urusan SKPD | : Rp. 1.153.272.500 |
| 2. Urusan Wajib dan Renja BPLH (Program) | : Rp. 6.652.353.500 |
| | Rp. 7.805.626.000 |

Tabel 2-9 Penetapan Kinerja Tahun 2015

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	
	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	PaguIndikatif
1	2	3
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	782,212,500.00

Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik	46,980,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	31,000,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor dan pengadaan suku cadang (Unit)	30,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)	59,320,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (lembar)	41,562,500.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (buah)	5,850,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	135,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	10,800,000.00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai ,rapat dan tamu (OH)	17,000,000.00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi,luar kabupaten dalam propinsi dan ibu kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara (HOK)	270,000,000.00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten	80,000,000.00

Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	54,700,000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	317,360,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Roda 4, dan Roda dua untuk operasional	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung dan halaman kantor, dan pemeliharaan/rehab taman	190,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua (unit)	127,360,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penunjang Kerja aparatur (%)	53,700,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya tugas penyusunan dokumen-dokumen ,laporan-laporan dan rencana kerja SKPD	25,000,000.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban SKPD	21,500,000.00
Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan	Tersedianya Sumber daya manusia dalam operasional SIMDA	7,200,000.00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran lingkungan (75%); porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (100%)	2,930,000,000.00
Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	Meningkatkan peran serta Stake Holder dalam penanganan kota bersih dan hijau (Point)	500,000,000.00
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terbina dan terawasinya usaha dan atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, terpantaunya kualitas lingkungan, dan tercapainya SPM Pencegahan Pencemaran Air dan Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak (Usaha/Kegiatan)	1,325,000,000.00
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. SPM :Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH	250,000,000.00
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan .	Tersusunnya juknis produksi Bersih Industri tekstil (proses dyeing - finishing) untuk mendukung 5 % peningkatan SPM/MDGs	75,000,000.00

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup	Tersusunya Produk hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	500,000,000.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada guru dan siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan masyarakat.(Orang)	200,000,000.00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan AMDAL dan UKL-UPL	Pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL (Perusahaan)	80,000,000.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase meningkatnya upaya konservasi air melalui biopori dan pembersihan sungai	600,000,000.00
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa SPM : Pelayanan Informasi Status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.	200,000,000.00
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber-sumber air	Terlaksananya kegiatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (LRB)	150,000,000.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terselenggaranya berbagai sosialisasi upaya konservasi sumber daya alam	250,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (5 %)	300,000,000.00

Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Meningkatnya kualitas dan akses informasi pengendalian pencemaran lingkungan	300,000,000.00
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan	2,797,353,500.00
PENGUJIAN EMISI / POLUSI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI	Tersedianya hasil pengujian kualitas udara	450,000,000.00
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Tersedianya hasil pengujian kualitas air	600,000,000.00
Pembangunan Tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah komunal yang dibangun Pemerintah	907,353,500.00
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Pembangunan <i>pilot project</i> sarana pengelolaan limbah domestik/puskesmas/peternakan (kegiatan)	250,000,000.00
Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan	Tersedianya peralatan AAS untuk pengujian logam	390,000,000.00
Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait masalah Lingkungan	Pengaduan masalah lingkungan oleh masyarakat	200,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		25,000,000.00

Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	25,000,000.00
--	--	---------------

3.9. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN BPLH TAHUN 2015

Sedangkan Penetapan Kinerja dalam rencana kerja perubahan tahun 2015 dukungan anggaran adalah :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Urusan SKPD | : Rp. 1.453.272.500 |
| 2. Urusan Wajib dan Renja BPLH (Program) | : Rp. 6.652.353.500 |
| | Rp. 8.105.628.000 |

Tabel. 2.5 Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sesudah perubahan	
	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1	2	3
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik	46,980,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan Kebersihan kantor	31,000,000.00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor dan pengadaan suku cadang (Unit)	30,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)	129,320,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (lembar)	71,562,500.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (buah)	5,850,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	335,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya penyediaan media informasi	10,800,000.00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai ,rapat dan tamu (OH)	17,000,000.00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam propinsi dan ibu kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara (HOK)	270,000,000.00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten	80,000,000.00
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	54,700,000.00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	517,360,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Roda Empat dan Roda 2 untuk operasional	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung dan halaman kantor dan pemeliharaan/rehab taman	390,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua (unit)	127,360,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penunjang Kerja aparatur (%)	53,700,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya tugas penyusunan dokumen-dokumen ,laporan-laporan dan rencana kerja SKPD	25,000,000.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban SKPD	21,500,000.00
Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan	Tersedianya Sumber daya manusia dalam operasional SIMDA	7,200,000.00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran lingkungan (75%); porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (100%)	2.930.000.000

Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura	Jumlah koordinasi dan sosialisasi dalam rangka Program Adipura Kota Soreang	500,000,000.00
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terbina dan terawasinya usaha dan atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, terpantaunya kualitas lingkungan, dan tercapainya SPM Pencegahan Pencemaran Air dan Pencegahan Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak (Usaha/Kegiatan)	1.325.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. SPM :Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH	250,000,000.00
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan .	Tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan kegiatan Produksi Bersih Industry tekstil	75,000,000.00
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	500,000,000.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Tercapainya peningkatan pengetahuan/pemahaman dan kepedulian warga sekilah terhadap Sekolah Peduli dan Berbudaya.	200,000,000.00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan AMDAL dan UKL-UPL	Pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL (Perusahaan)	80,000,000.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase meningkatnya upaya konservasi air melalui biopori dan pembersihan sungai	800,050,000.00
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersedianya buku status kerusakan tanah untuk produksi biomassa tahun 2015 dan profil pengelolaan tutupan vegetasi tahun 2015 dan Identifikasi calon lokasi Taman Kehati	245,050,000.00
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber-sumber air	Terselenggaranya berbagai sosialisasi upaya konservasi sumber daya air.	150,000,000.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terselenggaranya berbagai sosialisasi upaya konservasi sumber daya alam	405,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (5 %)	300,000,000.00
Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya referensi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bandung	300,000,000.00
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan	2.597.303.500

PENGUJIAN EMISI / POLUSI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI	Jumlah Data hasil uji kualitas Udara	450,000,000.00
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah data hasil uji kualitas air	600,000,000.00
Pembangunan Tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan limbah komunal yang dibangun Pemerintah	707,303,500.00
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Terselenggaranya berbagai sosialisasi/penyuluhan pengendalian pencemaran air	250,000,000.00
Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan	Persentase kualitas lingkungan yang dapat diuji	390,000,000.00
Pembentukan Unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait masalah Lingkungan	Terwujudnya pos pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	200,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		25,000,000.00
Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Kader Lingkungan Hidup di masyarakat	25,000,000.00

Dengan demikian dalam rencana kerja perubahan tahun 2015 terjadi penambahan anggaran sebesar RP. 301.542.300 (Tiga Ratus Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah)

Tabel Rencana Kerja Program Dan Kegiatan dan Pagu Indikatif Perubahan Terlampir

BAB IV

PENUTUP

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD berpedoman Rencana Kerja Tahun 2015 yang merujuk kepada RPJMD Kabupaten Bandung 2010-2015. Hal tersebut disebabkan agar program-program yang direncanakan dalam Renstra BPLH Kabupaten Bandung dalam 5 tahun ke depan dapat terintegrasi dengan baik dengan RPJMD yang sudah dibuat, sehingga diharapkan visi dan misi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung pun dapat tercapai dalam periode tersebut dengan maksimal.

Rencana Kerja Perubahan BPLH Kabupaten Bandung memuat Visi dan Misi, kebijakan dan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lingkungan hidup ini mengacu Rencana Kerja Tahun 2015 dan berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Bandung 2015.

Dalam penjabaran program dan kegiatannya, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan tahun 2015 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini dengan harapan dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran BPLH tahun 2015 yang sesuai dengan Kebijakan dan Prioritas pembangunan RKPD Perubahan Kabupaten Bandung tahun 2015.

Bandung, Juni 2015

KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG

Ir .Hj. ATIH WITARTIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19601225 198603 2 007